



Sidang Pekak Rubah, Kasus Penyerobotan Tahura Eksepsi Ditolak, Penangguhan Dikabulkan

DENPASAR, NusaBali

Pekak (kakek) 83 tahun bernama I Wayan Rubah yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi karena menjual tanah milik Tahura (Taman Hutan Rakyat) di Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung seluas 6 are bisa sedikit bernafas lega. Meski majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menolak eksepsi (keberatan atas dakwaan), namun permohonan penangguhan penahanan untuk pekak 83 tahun ini dikabulkan.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (8/5), majelis hakim pimpinan Angeliky Handayani Day membacakan putusan sela atas eksepsi yang diajukan terdakwa melalui kuasa hukumnya, Gusti Agung Ngurah Agung dkk.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak eksepsi terdakwa yang salah satunya menyebut dakwaan terhadap terdakwa Wayan Rubah adalah sengketa Tata Usaha Negara. Yang mana perkara tersebut wajib disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar.

Majelis hakim berpendapat eksepsi terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam persidangan. "Menolak eksepsi



terdakwa dan melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi," tegas hakim membacakan putusan sela.

Meski eksepsi ditolak, namun Pekak Rubah bisa sedikit bernafas lega setelah majelis hakim

mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dengan alasan kemanusiaan. Penangguhan penahanan ini sendiri setelah melihat kondisi kesehatan Pekak Rubah yang terus menurun di usia 83 tahun.

Bahkan menurut beberapa keluarga yang mendampingi selama sidang, Pekak Rubah kini sulit tidur dan kondisinya terus menurun. Bahkan untuk berjalan kini harus dipapah.

"Padahal sudah ditahan di

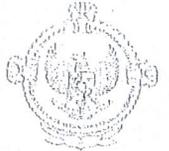
rumah, tapi masih sakit-sakitan terus," ujar salah satu keluarganya. Dalam dakwaan disebutkan, kasus ini berawal saat terdakwa ingin memiliki sebagian dari tanah Tahura di Perarudan Jimbaran menggunakan jasa pengurusan tanah kepada almarhum I Gede Putu Wibawajaya yang meninggal pada 6 September 2017 lalu.

"Pengurusan tanah melalui jasa Wibawajaya itu dilakukan dengan menggunakan surat kuasa tertanggal 16 Juni 2014. Dengan surat kuasa itu, terdakwa meminta untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah pada objek tanah itu yang sesungguhnya sebagian dari Tahura," jelas JPU.

Selanjutnya, dilakukan jual beli berbekal Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No 216 alamat Banjar Pararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.03.050.004.004-013.0 dengan luas 847 meter persegi atas nama terdakwa. Dalam aksinya, Pekak Rubah menunjukkan tanah Tahura tersebut seolah-olah miliknya. "Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 4.860.000.000. Nilai kerugian itu sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Bali," ujar JPU. rez

Edisi : Rabu, 9 Mei 2018

Hal : 5



Perawatan Kurang Optimal dan Kehujanan Alat Berat Dinas PUPR Karatan

TABANAN, NusaBali

Lima unit alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tabanan, karatan sehingga perawatannya tidak terkesah perawatannya tidak optimal. Padahal alat berat tersebut sering kali digunakan oleh pihak petugas PUPR dan masyarakat.

Alat berat tersebut terlihat karatan dan badannya sudah rapuh, juga karena umurnya sudah tua. Saat tidak digunakan, maka alat berat tersebut diparkir di halaman UPT Work Shop Dinas PUPR Tabanan, di Banjar Tonja, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan.

Pantuan di lapangan, alat berat tersebut nampak parkir



• NUSABALI/DESAK
Kondisi alat berat milik Dinas PUPR Tabanan di Banjar Tonja, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Jumat (11/5).

tidak di dalam bangunan. Sehingga saat hujan, maka alat berat ini kehujanan. Terlihat bagian badannya berkarat. Padahal kondisinya tidak rusak,

dan masih bisa digunakan saat masyarakat memerlukan.

Sekretaris Dinas PUPR Tabanan I Gusti Agung Oka Kamasan mengatakan, alat berat ini

ada biaya pemeliharaan setiap tahunnya. Tahun 2018 biaya pemeliharaan dianggarkan Rp 200 juta dari total alat berat yang dimiliki 23 unit. "Jadi untuk perawatan sudah sering dilakukan. Ini ada mekaniknya semua terawat," ujarnya.

Meskipun biaya pemeliharaan alat berat tahun 2018 berkurang dibandingkan tahun 2017, mencapai Rp 252 juta, kata Kamasan, tidak sampai kekurangan dana perawatan. "Jadi lebih atau kurangnya biaya pemeliharaan tergantung keperluan. Karena tahun 2018 kemungkinan ada alat lebih yang perlu di servis," katanya.

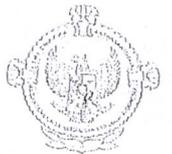
Diakuai, saat ini Dinas PURP Tabanan memiliki alat berat

sebanyak 23 unit. Mulai dari dua unit Buldozer, dua unit Stamper, sembilan unit Three Weels Roller, dua unit Tandam Roller, dua unit Vibration Roller, satu unit Vibration Plate, satu unit Stoom Walls, tiga unit Concrete Mixer, serta satu unit Aspal Equipment. "Dan seluruhnya masih bisa digunakan, termasuk yang saat ini sedang terparkir tersebut," jelasnya.

Alat berat itu memang umurnya sudah tua. Karena ada dari tahun 1974, 2006 dan 2014. Seluruhnya ini masih dalam kondisi bisa dipakai dan kerap kali dipinjam masyarakat secara swadaya. "Yang paling tua jenis Roller yakni tahun 1974," ujarnya. **d**

Edisi : Sabtu, 12 Mei 2018

Hal : 7



Biaya Pemeliharaan Puspem Badung Mencapai Rp 10 Miliar Setahun

MANGUPURA, NusaBali

Pemkab Badung menggelontorkan anggaran mencapai Rp 10 miliar selama 2018 untuk pemeliharaan kompleks Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawatan Pemkab Badung I Wayan Puja, Kamis (10/5), mengakui pemeliharaan Puspem Badung butuh biaya yang tidak sedikit. Biaya pemeliharaan tersebut meliputi bidang elektrikal, mekanikal, sipil, dan plumbing.

Bidang elektrikal, jelas Wayan Puja, di antaranya yang berhubungan dengan kelistrikan, termasuk pemeliharaan lampu. Bidang mekanikal yakni pemeliharaan genset, termasuk di dalamnya pemeliharaan rutin lift. Kemudian bidang sipil meliputi pemeliharaan tembok, ornamen-ornamen Bali, termasuk pembasmian rayap. Sedangkan untuk bidang plumbing yakni berhubungan dengan



KAWASAN Puspem Badung di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi. Untuk pemeliharaan kawasan perkantoran tersebut, pemkab menggelontorkan anggaran Rp 10 miliar per tahun.

• NUSABALI/ARI SISWANTO

pelaksanaan, pemeliharaan, perawatan instalasi air. "Terlebih pada saat hujan, basement di sejumlah kantor tergenang air. Makanya ini harus rutin kami pelihara, dan butuh biaya yang besar," katanya.

Mengenai total anggaran untuk pemeliharaan kompleks Puspem

Badung, Wayan Puja menyebut pada tahun 2018 ini mencapai Rp 10 miliar. "Jadi, pemeliharaan rutin yang kami lakukan kami ambil dari anggaran pemeliharaan Rp 10 miliar itu," ungkapnya.

"Beberapa waktu lalu, kami lakukan pemeliharaan taman

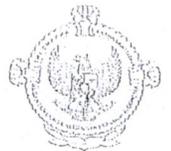
serta lampu penerangan yang ada di lingkungan Puspem Badung. Lampu yang beberapa mati, kami ganti. Begitu tiang yang warnanya sudah pudar, kami lakukan pengecatan ulang," tutur mantan Camat Kuta Selatan, itu.

"Karena kami *kan* butuh cepat melakukan penanganan, misalnya ada lampu mati atau genset mati, kami harus seketika memperbaiki. Anggarannya ya dari anggaran pemeliharaan (nilainya Rp 10 miliar, *Red*)," imbuh Wayan Puja.

Dikatakan, pemeliharaan ini juga demi menyongsong HUT Mangupura yang tinggal beberapa bulan lagi. "Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini memberikan kenyamanan bagi para pengunjung Puspem Badung. Terlebih saat ini banyak masyarakat yang berolahraga, jadi membuat masyarakat nyaman mungkin," tandasnya. Dia mengimbau agar masyarakat turut menjaga kebersihan dan keindahan areal Puspem Badung. **asa**

Edisi : Jumat, 11 Mei 2018

Hal : 2



Ratusan Kios dan Los Tidak Laku

PD Pasar Merugi Rp 10 Juta Per Bulan

Pembeli yang sepi membuat pedagang tak berminat menyewa kios dan los di Pasar Banyuasri.

SINGARAJA, NusaBali

Sebanyak 151 kios dan los di Pasar Banyuasri, Singaraja, dalam keadaan kosong. Ini lantaran, tidak ada lagi pedagang yang tertarik menyewa tempat itu. Konon, pedagang tidak melihat peluang menguntungkan, karena pembeli ke Pasar Banyuasri semakin sepi. PD Pasar pun mengaku kehilangan pendapatan dalam sebulan sebesar Rp 10 juta.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Buleleng, Putu Gede Satwikayadnya Senin (7/5) mengaku telah berupaya me-

maksimaln kios dan los di Pasar Banyuasri. Salah satu upayannya dengan menarik sertifikat hak registrasi terhadap pemilik kios dan los yang tidak difungsikan.

Sertifikasi itu kemudian disewakan lagi kepada warga yang berniat berjualan di dalam pasar. Sebagian berhasil difungsikan kembali, namun tidak sedikit juga yang tidak laku. "Di Banyuasri itu kios, los dan pelataran yang kita sewakan itu sebanyak 1.045. Sejak lama banyak tempat yang tidak difungsikan. Sejak kami menjabat trobosan untuk mengoptimalkan kios atau los yang tidak produktif itu menjadi menghasilkan. Karena banyaknya, sekarang masih ada 151 kios dan los yang tidak laku disewa oleh pedagang," katanya.

Diakui, salah satu kios yang sempat difungsikan kemudian ditinggal oleh para pedagang adalah kios burung. Para pedagang meninggalkan Pasar Banyuasri, karena merugi aki-

bat tidak adanya pengunjung yang datang. Para pedagang itu pilih kembali berjualan ke Pasar Mumbul. "Nah itu salah satu, diawal kita usahakan diisi oleh pedangan burung, namun belakangan mereka balik lagi ke Pasar Mumbul, karena disana katanya tidak ada pengunjung sama sekali, sehingga mereka tidak dapat jualan," terangnya.

Menurut Satwikayadnya, kios atau los yang tidak disewakan itu mengakibatkan perusahaan kehilangan pendapatan dari sewa tempat bulanan dan cukai pedagang harian. Diperkirakan dari situasi ini, perusahaan gagal mendapatkan penghasilan dari ratusan kios dan los yang tidak ditempati itu lebih dari Rp 10 juta per bulan.

Atas kondisi ini, direksi berusaha untuk menawarkan tempat tersebut kepada pedagang.

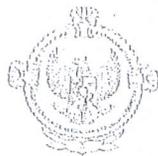
Direksi rencananya akan menyewakan kios dan los tersebut kepada pedagang bunga atau pedagang canang yang berjualan di tempat yang dilarang.

Pendataan sementara ada sekitar 20 orang pedagang bunga atau canang berjualan tidak pada tempatnya. Pedagang ini akan ditawarkan menyewa kios atau los yang sampai sekarang masih kosong tersebut.

Menunggu pedagang yang tertarik menyewa, pihaknya juga mempersiapkan untuk merehab bangunan kios dan los tersebut. Hal ini penting karena dari dahulu salah satu alasan pedagang tidak tertarik menempati kios dan los ini karena kondisinya rusak. Kalau dipaksakan ditempati pedagang khawatir merusak komoditas dagangan mereka. "Memang karena tidak ditempati, sehingga kita tidak mendapat pemasukan dari kios dan los itu. Kami sudah merancang pedagang canang dan bunga di sana akan diarahkan menempati tempat itu. Kami sedang menyiapkan sambil memperbaiki karena bangunannya sejak lama dibiarkan rusak," jelas Satwikayadnya. **k19**

Edisi : Selasa, 8 Mei 2018

Hal : 4

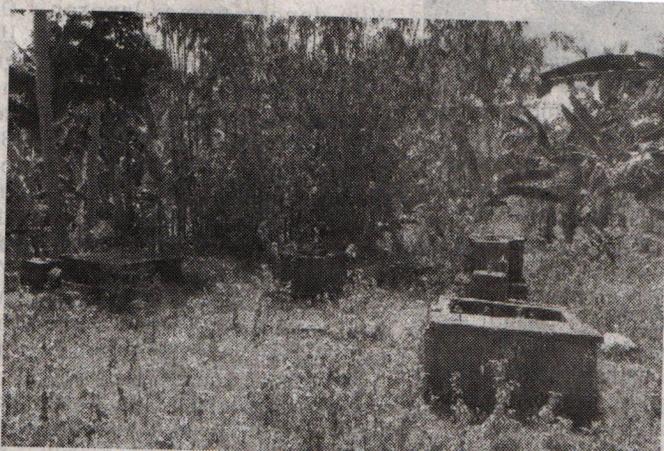


Komisi II Pantau Proyek Biogas di Nusa Penida

SEMARAPURA, NusaBali

Komisi II DPRD Klungkung mengecek proyek biogas di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung. Karena proyek yang menelan anggaran Rp 890 juta ini masih mubazir alias belum bermanfaat. Kejari Klungkung pun sudah menyelidiki kasus ini, dan tinggal penetapan tersangka.

Namun masyarakat sekitar masih berharap agar biogas itu berfungsi. Hal itu diakui anggota Komisi II DPRD Klungkung Gde Artison Andarawata. "Biogas banyak tidak dipergunakan karena dicoba masyarakat tidak menghasilkan gas seperti yang diharapkan," ujar pria yang akrab disapa Sony ini, kepada NusaBali. Kata dia, seharusnya setelah selesai, masyarakat agar didampingi sampai kompor dan lampu



Kondisi proyek biogas di Nusa Penida, Klungkung, Kamis (3/5). • IST

biogas menyala. Pendampingan itu perlu, jangan usai diberikan lalu ditinggalkan. "Masyarakat masih berharap bisa berfungsi dan dapat dimanfaatkan," ujarnya. Setelah

data terkumpul, pihaknya akan memanggil dinas terkait dalam rapat kerja.

Ketua Komisi II DPRD Klungkung I Komang Suantara menambahkan, pihaknya sudah

datang ke beberapa titik di lokasi proyek biogas tersebut. Pihaknya sudah mengumpulkan data, termasuk meminta keterangan dari masyarakat yang menerima. "Nanti rapat kerja kami akan buka file itu semua. Komisi II dari segi pengawasan sudah kami lakukan," ujarnya.

Kejari Klungkung tengah mendalami dugaan penyimpangan proyek biogas ini. Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kementerian ESDM dan 10 persen dari APBD tahun 2014, total Rp 890 juta.

Proyek tersebut tersebar di tiga desa di Nusa Penida, yaitu Desa Sakti, Desa Klumpu, dan Desa Kutampi Kaler. Dari 40 titik biogas yang direncanakan hanya 38 titik saja terlaksana sedangkan 2 titik tidak ada. Per satu unit biogas bernilai Rp 22 juta. Ketika itu proyek biogas ini

di bawah leading sektor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa Klungkung.

Kasi Pidsus Kejari Klungkung Meyer V Simanjuntak mengakui pihaknya tengah menyelidiki proyek biogas tersebut sejak tahun 2016. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dalam laporan tahunannya mengungkapkan, proyek tidak termanfaatkan. "Setelah kami turun dari 40 titik biogas hanya 38 titik saja yang terealisasi," ujarnya belum lama ini.

"Kami sudah memeriksa sekitar 70 saksi," ujarnya. Selain penerima bantuan biogas, pihak Kejaksaan juga memeriksa pejabat eselon II (setingkat Kadis), eselon III (Setingkat Kabid), termasuk anggota DPRD aktif beserta istrinya karena terlibat sebagai pemborong. **wan**

Edisi : Jumat, 04 Mei 2018

Hal : 6